

Masa Depan Faksionalisme Politik Golkar Pasca Orde Baru

Asep Nurjaman¹

asepnurjaman68@gmail.com

Abstrak

Sejak kelahirannya, Golkar merupakan partai yang diusung oleh berbagai kelompok fungsional dengan tujuan membangun kekuatan politik untuk menadingi PKI. Sejak terjadinya reformasi, Golkar banyak ditinggalkan oleh banyak kelompok pendukungnya yang membentuk faksionalisme. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perubahan faksionalisme di internal Golkar pasca Orde Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari jurnal, buku, maupun internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Golkar pasca Orde Baru banyak mengalami perubahan faksionalisme; faksionalisme yang terjadi pada masa Orde Baru bersumber dari kelompok fungsional, sementara setelah reformasi menjadi faksionalisme berbasis personalisme.

Kata Kunci: *Faksionalisme, Golkar, Pasca Orde Baru*

Abstract

Since its inception, Golkar is a party that is carried by various functional groups with the aim of building political power to challenge the PKI. Since the reform era, Golkar has been abandoned by many of its support groups that have formed factionalism. The purpose of this study is to analyze the change of factionalism in the internal of Golkar in the post-New Order. The research method used is qualitative descriptive. The data used are secondary data derived from journals, books, and internet. The results show that: Golkar post-New Order experienced many changes in term of factionalism; factionalism that occurred during the New Order period stemmed from functional groups, while after the reforms became a factionalism based on personalism.

Keywords: *Factionalism, Golkar, Post-New Order*

Pendahuluan

Partai politik merupakan institusi penting dalam demokrasi, khususnya demokrasi perwakilan (*modern democracy*). Partai politik yang merupakan sarana artikulasi kepentingan menjadi ruang yang subur bagi tumbuhnya persaingan kelompok maupun elit dalam rangka memenangkan pengaruh dan posisi penting dalam partai. Persoalan kepentingan yang diperjuangkan dalam partai secara langsung maupun tidak langsung melahirkan segmentasi di dalam tubuh partai yang termanifestasi dalam bentuk faksionalisasi. Golkar yang merupakan partai politik yang lahir pada jaman Orde Baru merupakan salah satu partai yang tumbuh dengan

¹ Korespondensi: Asep Nurjaman, Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Jalan Raya Tlogomas 246 Malang, HP. 081330186869

beragam kepentingan di dalamnya dan melahirkan banyak faksi yang bersaing di dalamnya.

Pada masa Orde Baru partai Golkar merupakan partai penguasa (*the ruling party*) yang menjadi mesin politik utama bagi pemerintahan Orde Baru dibawah komando Soeharto. Faksionalisme di dalam tubuh partai Golkar utamanya bersumber pada tiga arus besar yaitu ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Pada saat Orde Baru bubar, walaupun tidak lagi menjadi partai penguasa, kondisi partai Golkar masih tetap bertahan walaupun sudah banyak ditinggalkan oleh para pendukungnya. Fenomena Partai Golkar ini menarik untuk diteliti, bagaimana faksionalisme di tubuh Partai Golkar pasca tumbangnya Orde Baru. Penelitian ini bertujuan antara lain: pertama, menemukan pola faksionalisme baru di dalam tubuh Partai Golkar pasca Orde Baru. Kedua, menemukan pola kompetisi antar faksi di dalam tubuh organisasi Politik Golkar. Ketiga menemukan faktor-faktor yang memberi kontribusi pada peningkatan tensi konflik antar faksi di dalam tubuh partai politik.

Tinjauan Pustaka

1. Partai Politik

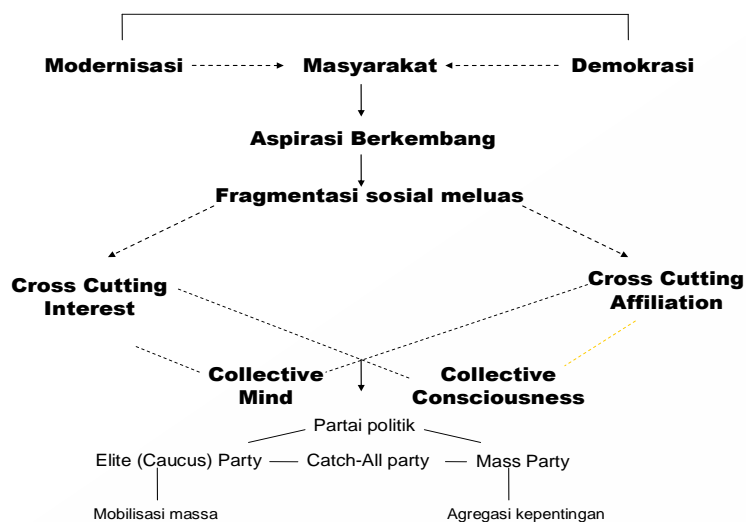
Konsep partai politik dipergunakan untuk pertama kalinya pada abad sembilan belasan dalam sistem politik yang kompetitif (Amstuzt, 1982: 222). Konsep tersebut ditujukan kepada kelompok politik yang berkompetisi untuk menggapai kekuasaan dalam sebuah kompetisi terbuka. Dengan demikian, partai politik hanya akan ada dalam sebuah kehidupan politik yang kompetitif. Selanjutnya istilah partai dipergunakan secara kaku yaitu hanya untuk menunjukkan organisasi politik yang menghubungkan orang-orang dengan pemerintahan, masyarakat dengan negara (Newman, 1956).

Ada banyak ragam definisi dari partai politik, misalnya “partai politik merupakan organisasi politik independen yang bertujuan untuk dapat memobilisasi dukungan guna mengontrol pemerintahan” (Amstuzt, 1982: 222); “sekelompok orang yang diorganisir untuk tujuan mendapatkan kekuasaan pemerintahan, dengan melalui pemilihan atau dengan cara lain” (Heywood, 1997); “*any political group identified by a given label that present at election, and is capable of placing through elections candidates for public office*” (Sartori, 1959); “*permanent organizations which contest elections, usually because they seek*

to occupy the decisive decisions of authority within the state” (Hagopian, 1978). Sementara dalam UU No. 31/2002 partai politik didefinisikan sebagai “Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum”.

Setelah dikemukakan mengenai definisi partai politik, perlu juga dikemukakan mengenai fungsi dari partai politik. Berkenaan dengan fungsi partai politik ini, John F. Bibby (1992) menyebutkan ada enam fungsi dari partai politik. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: Pertama, *serving as intermediaries*, yaitu sebagai penghubung atau mekanisme penghubung antara warga Negara dengan pemerintah; kedua, *nominating candidates*, yaitu penentu orang-orang yang akan dipilih dalam pemilihan umum; ketiga, *contesting elections and channelling*, yaitu mendorong pemilih untuk ikut dan menyalurkan suara dalam pemilu; keempat, *organizing the government*, yaitu mengorganisasikan pemerintahan seperti parlemen atas dasar dukungan; kelima, *providing public accountability*, yaitu mengontrol jalannya pemerintahan; keenam, *managing conflict*, yaitu mendamaikan konflik akibat dari adanya persaingan diantara berbagai tuntutan kelompok (Bibby, 1992: 5-13).

Gambar 1. Model Terbentuknya Partai Politik



Sumber: Riswanda Imawan, Bahan Kuliah Partai Dan Pemilu, Program Studi Ilmu Politik UGM, 2004.

2. Budaya Patron and Client

Studi yang paling awal mengenai masyarakat Jawa, khususnya masyarakat desa Jawa, menunjukkan peran menentukan dari kepemimpinan dalam membentuk perilaku individu. Karya Feith (1962-3), Geertz (1960a, 1960b, 1965), Hofstede (1971), Robert Jay (1963, 1969), Kuncaraningrat (1967, 1985), dan Sartono Kartodirjo (1966, 1972, dan 1984) tidak hanya menunjukkan satu kasus.

Masyarakat Jawa umumnya memahami masyarakat dalam dua pembilahan, yaitu wong gedhe orang berpengaruh dan wong cilik orang pada umumnya. Wong gedhe umumnya dipahami sebagai pemimpin yang punya sudut pandang yang sama sebagaimana orientasi masyarakat kota, “orang pintar”, “pengambil keputusan yang efektif” dan “mempunyai kewenangan dalam kehidupan lokal.” Sementara wong cilik disisi lain merupakan pengikut yang hanya dipahami sebagai orang pasif dan masa bodoh, dan “orang yang tidak mengerti” seperti Clifford Geertz menggambarannya secara menarik (Geertz, 1965: 119-152).

Secara Sama Anderson dalam diskusinya tentang kekuasaan dalam masyarakat Jawa menyebutkan:

"In general, little thinking was devoted to the sociology of Indonesian politics, and insofar as there was any sociological perspective at all, it centered on an elite-mass dichotomy, symbolized by the words pemimpin and rakyat. The word pemimpin (leader, big shot), like its synonyms tokoh, orang gedhe and pembesar, is quite undifferentiated in character and is applied without any sense of disjuncture to officials, generals, and politicians alike. At the bottom of the political system are the rakyat (often translated as "the people" or "the common people"), again a term without any precise sociological contours. The rakyat are those who are masih bodoh (nonelite or nonleaders). Obvious parallels can be drawn with the older division priyaji and wong cilik (little man), and literati and illiterates."

Stratifikasi dalam masyarakat desa Jawa mungkin juga dapat dipahami dalam dua bagian pembilahan seperti diatas, yaitu pemimpin dan pengikut atau rakyat. Banyak para sarjana mencoba menggambarkan hubungan antara pemimpin dan rakyat sebagai pola komunikasi dimana pemimpin merupakan figur dominan ketika berhadapan dengan rakyat. Tipe hubungan dinamakan sebagai pola hubungan patro-cilent atau bapak-anak buah (Karl Jackson, 1980; Silalahi, 1977; dan Sartono kartodirjo, 1984).

Dalam diskusinya Jackson mengemukakan mengenai pola partisipasi masyarakat Jawa Barat “*the critical factor for the vast majority who live in villages is that the*

decision have already been made for them by their superiors in the networks previously established superior-subordinate relations that dominate their social and hence their political lives” (Jackson, 1980: 185). Persoalannya dalam analisis Jackson adalah, pertama dia tidak menunjukkan secara nyata dasar kekuasaan kepemimpinan politik di dalam masyarakat desa, kedua, cilitilisme bukan hanya merupakan fenomena masyarakat Jawa, karena ini dapat juga ditemukan dalam berbagai pola hubungan kekuasaan baik itu didalam masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Ketiga, Jackson tidak memahami kenyataan bahwa ada faktor ideologi yang umum yang membuat pemimpin dan pengikut mempunyai pola perilaku politik umumnya. Ia mencatat bahwa *”obedient behavior is not based on agreement with the leader’s position regardless of the ideological contradictory turns that he may take,”* (Jackson, 1980: 186). Ia juga menolak dengan menyatakan bahwa kenyataan pengikut akan tidak selalu patuh terhadap pemimpin sebagaimana ditunjukkan oleh James Scott.

Konsep kekuasaan karismatik dalam pandangan Weberian lebih cocok untuk menjelaskan pola kepemimpinan dalam masyarakat desa Jawa. Menurut Weber, dasar kepemimpinan karismatik adalah kepercayaan bahwa pemimpin ditakdirkan dan kelebihan khusus yang orang pada umumnya tidak mempunyai, seperti kekuatan supra natural, dan

“the charismatic leader gains and maintains authority solely by proving his strengt in life...he must perform miracles, and he must perform heroic deeds, and it is the qualified leader as such who is obeyed by the virtue of personal trust in him and his revelation his heroism or his exemplary qualities so far as they are found within the scope of individuals’s belief in his charisma”.

Konsep kepemimpinan karismatis juga dibahas oleh Soermasaid Moertono dan juga Ben Anderson mengenai kesaktian (kesakten) dalam konsep kekuasaan Jawa. Karisma adalah kemampuan seorang pemimpin dalam ilmu gaib atau hal-hal bersifat keramat untuk memperbesar pengaruh sehingga keabsahannya sebagai pemimpin dia kui dan didukung. Konsep kesakten adalah konsep inti dalam ideologi atau paham Jawa tradisional tentang kekuasaan.

Sementara ciri-ciri kepemimpinan Karismatis Ann Ruth Willner mengemukakan sebagai berikut. Pertama, adanya keyakinan bahwa sang pemimpin memiliki kualitas istimewa yang superhuman; kedua, para pengikutnya kehilangan kritisme terhadap pemimpinnya, bahkan cenderung memperlakukan pendapat atau

sikap pemimpinnya sebagai suatu kebenaran; ketiga, para pengikut memberika loyalitas mutlak kepada para pemimpinnya; dan keempat, massa pengikut senantiasa memperlihatkan komitmennya yang emosional dan personal terhadap pemimpinnya. Namun Menurut Hajrianto Tohari, karena kepercayaan kepada karismatis seorang pemimpin selalu bersifat lokal dan terbatas, dan tidak pernah nasional, apalagi universal, yakni karisma ditempatkan, daerah, atau golongan tertentu saja, serta tidak bagi komunitas atau tidak pada entitas politik lainnya, maka kepemimpinan karismatis cenderung menciptakan primordialitas dan komunalitas.

Dalam masyarakat Desa Jawa, tipe kepemimpinan ini juga dimiliki baik oleh pemimpin yang mempunyai posisi dalam birokrasi formal sebagai kepala desa, dan pemimpin diluar birokrasi, khususnya pemimpin spritual. Dalam kasus ini, Sartono Kartodirdjo berpendapat bahwa, “di luar pejabat pemerintahan terdapat juga pemimpin alami yang berkuasa seperti kyai lokal, haji, guru, dukun (Kartodirdjo, 1972: 78). Para pemimpin tersebut mempunyai atribut tertentu seperti jimat yang memberikan perlindungan dari bahaya, mempunyai ilmu kedigjayaan, ilmu pengetahuan, ilmu keselamatan, yang memberi kekuasaan sebagai manusia lebih (Kartodirdjo, 1972: 79). Tipe kepemimpinan ini dapat membentuk perilaku politik dalam negara berkembang seperti Indonesia.

3. Faksionalisme

Definisi Faksionalisme digambarkan sebagai 'faksi' kelompok dengan karakteristik yang sangat berbeda. Dalam kebanyakan kasus, konteks dan ruang lingkup penelitian sebagian besar mempengaruhi definisi dari faksionalisme. Faksi sebagai kombinasi atau pengelompokan pemilih dan pemimpin politik yang bersatu di waktu tertentu dalam mendukung calon. Selanjutnya, definisi dari faksi cenderung dikaitkan dengan identifikasi kekuatan organisasi. Sebuah analisis rinci dari faksionalisme partai dipelopori oleh Raphael Zariski dan itu adalah analisis konseptual pertama yang menawarkan hipotesis untuk menjelaskan politik faksi menggunakan kerangka komparatif.

Zariski mendefinisikan faksi sebagai: setiap intra-partai kombinasi, atau pengelompokan yang anggotanya berbagi rasa identitas umum dan tujuan umum dan diatur untuk bertindak secara kolektif sebagai blok yang berbeda dalam partai untuk mencapai tujuan mereka. Pemahaman Zariski tentang faksi jelas menyiratkan tingkat

daya tahan tertentu dari organisasi. Ia menunjukkan kebutuhan untuk faksi memiliki identitas umum dan menjadi terorganisir secara kolektif. Kecenderungan ini mengilhami definisi ini lebih berlaku untuk negara-negara dengan sistem politik yang lebih mapan dan pihak yang dilembagakan. Penafsiran sempit tentang faksi diperkenalkan oleh Nathan yang cenderung mengasosiasikan faksi dengan ikatan patron-klien terlepas dari tingkat organisasi. Menggambar dari analisis pengelompokan dalam Partai Komunis China, faksi menurut Nathan dapat dianggap sebagai "jaringan pribadi pemimpin individu yang beroperasi pada dasar hubungan klientelis untuk tujuan politik mereka". Meskipun masalah organisasi, sarjana lain telah mencoba untuk fokus pada dasar kelompok yang terbagi.

Perdebatan lain yang berkaitan dengan aspek-aspek motivasi dari faksi partai adalah apakah faksi dasarnya kelompok ideologis. Pembahasan mengenai faktor ideologis di faksi formasi dasarnya berasal dari gagasan bahwa faksi mungkin memiliki berbagai tujuan, kepentingan daerah atau kelompok, pengaruh pada strategi partai dan dari pemerintah, dan promosi seperangkat nilai diskrit.

Dalam banyak kasus, ideologi faksionalisme menjadi aspek penting dalam pembentukan identitas partai. Ideologi konflik mencerminkan perbedaan pendapat tentang nilai yang ditegakkan. Magone menyatakan bahwa kontroversi ideologi sering didasarkan pada desain politik untuk organisasi internal partai dan sistem politik di masa depan. Perdebatan lain yang berkaitan dengan aspek-aspek motivasi dari faksi partai adalah apakah faksi dasarnya kelompok ideologis. Pembahasan mengenai faktor ideologis di faksi formasi dasarnya berasal dari gagasan bahwa faksi mungkin memiliki berbagai tujuan, kepentingan daerah atau kelompok, pengaruh pada strategi partai dan dari pemerintah, dan promosi seperangkat nilai diskrit. Dalam banyak kasus, ideologi faksionalisme menjadi aspek penting dalam pembentukan identitas partai. Ideologi konflik mencerminkan perbedaan pendapat tentang nilai yang ditegakkan. Magone menyatakan bahwa kontroversi ideologi sering didasarkan pada desain politik untuk organisasi internal partai dan sistem politik di masa depan. Beller dan Belloni hati-hati menentukan faksi sebagai: setiap kelompok yang relatif terorganisir dan yang bersaing dengan rival kekuasaan keuntungan dalam kelompok yang lebih besar dari yang merupakan bagian.

Metode

Partai Golkar merupakan partai pendukung Orde Baru dengan system organisassi yang kuat. Namun demikian, dalam internal partai Golkar ada bibit-bibit perpecahan yang muncul akibat adanya faksionalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gejala faksionalisme di dalam tubuh partai Golkar di era multi partai. Guna kepentingan perolehan data, penulis mempergunakan studi kepustakaan baik berupa Jurnal, Buku, maupun Internet. Analissa dalam penelitian ini menggunakan model comparative analysis, yaitu sebuah metode analisis yang mempergunakan perbandingan sebagai perangkat untuk memahami dan menjelaskan fenomena faksionalisme di dalam tubuh partai politik, khususnya Partai Golkar. Golkar pada masa Orde Baru dipakai sebagai pembanding untuk menjelaskan model faksionalisasi dan resolusi konflik antar faksi di internal partai Golkar di era Multi Partai.

Hasil dan Pembahasan

1. Faksionalisme Politik Pasca Orde Baru

Dalam penelitian ini dibedakan antara partai baru dan partai lama. Partai lama adalah partai yang telah berhasil berkompetisi dalam semua pemilu demokratis sejak 1999, sementara partai baru adalah partai yang hanya mulai berpartisipasi dalam pemilu tahun 2004 atau sesudahnya. Memahami kedua kelompok partai ini berguna karena kedua kelompok ini tidak hanya berbeda dalam jangka waktu organisasi, tetapi juga dalam akar di masyarakat dan struktur organisasi mereka. Hal ini pada gilirannya akan berimplikasi pada pola-pola faksionalisme yang terjadi.

“Secara tipologis, partai-partai baru termasuk Partai Demokrat, PD, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerakan Indonesia Raya, Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Rakyat Nurani Rakyat, Hanura) dan Partai Demokrasi Nasional (Nasional Demokrat) Nasdem) semuanya dapat diklasifikasikan sebagai 'partai-partai personalistis'” (Gunther dan Diamond, 2003: 187 dalam Fionna dan Tomsa, 2017). Tujuan mereka pada saat pembentukan adalah untuk melayani sebagai kendaraan pemilihan untuk ambisi presiden dari tokoh-tokoh politik utama. Secara signifikan, semua partai ini didirikan oleh atau untuk mantan jenderal atau taipan yang sebelumnya terkait dengan Golkar (Aspinall dan Sukmajati, 2016: 17 dalam Fionna dan Tomsa, 2017).

Secara sederhana, ciri yang paling menonjol dari partai lama (Golkar dan PPP) tidak adanya tokoh sentral yang sangat berkuasa dalam partai. Hal ini berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tradisi partai dinasti

yang berpusat pada pemimpin partai Megawati Soekarnoputri. Sebagaimana halnya partai lama lainnya, PDIP memiliki unsur-unsur clientelistic yang kuat, terutama di tingkat lokal. Lebih jauh, generasi baru partai yang lahir dan ikut pemilu mulai 2004 lebih menunjukkan cita-cita atau ambisi pribadi dari pendiri partai. Banyak partai yang berdiri dan ikut pemilu pasca 1999 hanya dijadikan sebagai kendaraan bagi individu pendiri partai untuk maju dalam pencalonan presiden. Kenyataan ini memunculkan konsep baru tentang partai di Indonesia di era multi partai sebagai “*presidentialis party*”.

Perbedaan dalam pengembangan organisasi dan struktur institusional antara partai lama yang lebih tua dan partai presidensial yang lebih baru memiliki implikasi untuk ruang lingkup dan sifat faksionalisme yang lazim dalam partai-partai ini. Sebagai kelompok yang diorganisir secara longgar dalam organisasi yang lebih besar yang saling bersaing untuk mendapatkan kekuatan (Belloni dan Beller, 1978: 419 dalam Fiona dan Tomsa, 2017). Faksi-faksi dapat berkisar dari faksi-faksi terprogram yang relatif koheren yang mengejar tujuan kebijakan, di sisi lain ada faksi-faksi clientelistic yang lebih cair yang berkumpul di sekitar pelindung kuat dengan harapan mendapatkan akses ke sumber daya patronase yang menguntungkan.

“Di Indonesia, jejak-jejak pembagian program atau bahkan ideologis masih dapat ditemukan di beberapa partai lama, tetapi secara keseluruhan pola dominan faksionalisme dalam beberapa tahun terakhir telah dibentuk oleh apa yang Sartori (1976: 76) disebut 'faksi kepentingan' daripada 'Faksi-faksi prinsip’” (Fiona dan Tomsa, 2017).

Kondisi tersebut terindikasi terjadi dalam partai partai baru yang lebih personalis di mana dinamika faksi berputar hampir secara eksklusif di sekitar akses ke sumber-sumber patronase yang didistribusikan oleh pemimpin dominan.

2. Faksionalisme di Tubuh Golkar

Kelahiran Partai Golkar diawali dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya dan menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu. Sekber Golkar sendiri merupakan gabungan beberapa organisasi. Karena banyaknya Organisasi-organisasi

yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu: Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), Gerakan Pembangunan Untuk menghadapi Pemilu 1971.

“Hasil restrukturisasi pada Oktober tahun 1969, adalah Sekber Golkar melakukan reorganisasi dengan membuat tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO), diantaranya SOKSI, KOSGORO, MKGR, Profesi, Ormas Hankam, dan Karya Pembangunan. Organisasi-organisasi tersebut adalah organisasi baru yang menampung kaum intelektual dan politisi Orde Baru yang modernis dan berpikiran reformis” (Hadi dan Kusuma, 2012)

Lebih jauh, pada waktu itu Golkar dikenal dengan sebutan Sekber Golkar karena berhasil menghimpun kekuatan dari berbagai organisasi pemuda, buruh, petani, nelayan, militer dan berbagai macam organisasi lainnya untuk mereduksi kekuatan PKI di Indonesia (Maringantua, 2015).

Pasca Orde Baru, Partai Golkar menghadapi tekanan dari segala arah, baik dari internal maupun eksternal partai. Atas nama reformasi, banyak kalangan menuntut agar partai Golkar dibubarkan karena jadi bagian dari Orde Baru. Kondisi tersebut membuat partai Golkar harus menghadapi segala tekanan dan hal ini juga memicu menguatnya konflik internal Partai Golkar. Guna merespon tekanan eksternal dan internal akibat reformasi politik, Partai Golkar melakukan konsolidasi dengan diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Musyawarah ini terdapat dua blok dari pihak birokrasi (sipil) di bawah pimpinan Akbar Tandjung dan blok militer di bawah pimpinan Edi Sudrajat yang kemudian hasil musyawarah dimenangkan oleh Akbar Tandjung dari kelompok sipil yang pro reformasi.

Eksistensi Partai Golkar masa reformasi terus meningkat di bawah pimpinan Akbar Tandjung. Hal ini dapat dilihat dari hasil Pemilu 1999 dan 2004 dimana Partai Golkar masih tetap eksis dalam memenangkan Pemilu meskipun disisi lain mengalami penurunan dibandingkan masa Orde Baru. Hal ini dikarenakan Golkar di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung mengikuti semangat

baru reformasi dengan menunjukkan keterbukaan Partai Golkar terhadap proses demokratisasi, yang diwujudkan dalam paradigma baru Partai Golkar. Selanjutnya, dalam Munas VII Golkar di Bali memperlihatkan adanya fenomena faksi-faksi yang terbentuk atas kepentingan politik dari masing-masing basis social: dari kalangan birokrat dibawah pimpinan Akbar Tandjung; kalangan militer dibawah pimpinan Wiranto; dan kalangan pengusaha dibawah pimpinan Jusuf Kalla yang saat itu telah menjabat sebagai wakil presiden. Hasil Munas ini memilih ketua umum Partai Golkar periode 2004-2009, yaitu; Jusuf Kalla. Jusuf Kalla dianggap akan membawa ruang kekuasaan baru bagi Partai Golkar di pemerintahan.

“Penyebab dukungan Partai Golkar terhadap praktik politik klan ini adalah yang *pertama*, karena mahalanya demokrasi di Indonesia maka partai-partai politik di Indonesia membutuhkan sumber pembiayaan agar dapat bertahan dalam kontestasi politik di Indonesia. Partai Golkar yang pada awalnya disokong oleh rezim dalam segala hal termasuk pembiayaan, pasca reformasi sokongan dana tersebut hilang dan dengan terpaksa mencari sumber dana lain yang bisa membiayai operasional partai” (Ridha, 2016).

3. Faksionalisme Partai Golkar: Dari Fungsional ke Personal

Sebagai wujud dari keterbukaan, Golkar menjadi partai terbuka bagi siapa pun untuk masuk menjadi kader. Kondisi ini satu sisi memberi energy baru bagi Golkar dalam menghadapi persaingan politik, namun di sisi lain dengan masuknya kader baru, juga menambah tensi politik di internal semakin tinggi. “Inklusivisme yang dibawah Partai Golkar saat reformasi, membuat intensitas konflik internal Partai Golkar semakin tinggi, karena semakin banyak kalangan yang masuk dalam partai. Hal ini berarti semakin banyak kepentingan di internal partai dan berdampak pada pengorganisasian Partai Golkar dari level pusat sampai daerah. Hal ini terlihat dari hasil pemilihan kepala daerah langsung sepanjang 2004-2009, dimana Partai Golkar mengalami penurunan” (Misrina, 2010:5).

“Belakangan ini, konflik internal yang terus merongrong Golkar menjadi batu sandungan dalam memperkuat konsolidasi. Pergumulan perebutan kekuasaan oleh para elit partai, telah menyebabkan partai ini tidak lagi mengurus kader-kadernya dengan baik. Golkar era reformasi memang lagi tidak memiliki tokoh center yang menjadi panutan dan bahkan, generasi yang berada di dalamnya termasuk generasi “tua”. Akibatnya, banyak kader yang pindah ke partai lain atau bahkan mendirikan partai baru.” (Mawazi, 2017)

Lebih jauh, perhelatan pilkada yang mendorong para kader bersifat pragmatis. Kondisi ini merugikan Partai Golkar, karena konsolidasi partai dalam menghadapi pemilu 2014 menjadi terganggu. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya suara partai Golkar pada pemilu 2009. Hasil pemilu 2009 menyatakan Partai Golkar mendapat 14% suara dari 20% hasil suara pada pemilu 2004. Kemerosotan Partai Golkar pun terjadi di daerah-daerah basis massa Golkar yang telah dikuasai oleh Partai Demokrat.”

“Pada pemilu tahun 2009 diikuti 38 partai politik nasional. Hanya sembilan partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 persen, yaitu Partai Demokrat 20,85 persen, Partai Golkar 14,45 persen, PDI-Perjuangan 14,03 persen, PKS 7,88 persen, PAN 6,01 persen, PPP 5,32 persen, PKB 4,94 persen, Gerindra 4,46 persen, dan Hanura 3,77 persen. Partai Demokrat yang memperoleh 20,85 persen suara dan menjadi pemenang dalam pemilu 2009 itu. kemenangan PD tidak lain ialah berkat tokoh karismatik seorang Susilo Bambang Yudoyono. Posisi sebagai presiden dan dewan pembina PD, telah berhasil mendongkrak suara PD. Tetapi, karena sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, meskipun PD memenangkan pemilihan legislatif, tidak berarti ia bisa langsung duduk di kursi kepresidenan” (Mawazi, 2017).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa di dalam tubuh partai Golkar, terjadi perubahan faksionalisme yang tadinya dari kelompok fungsionalis menjadi lebih ke personal. Banyak kader yang berusaha mendapatkan rekom partai Golkar dengan menunjukkan kesetiaannya pada pimpinan partai (Ketua Umum) di dalam menjalankan organisasi. Dengan demikian, kekuatan kelompok fungsional di dalam tubuh Golkar posisinya sudah digantikan dengan kekuatan kekuatan personal yang umumnya adalah orang kuat yang pernah mendudukkan pimpinan teras Golkar. Hal ini secara tersirat diakui oleh Jusuf Kalla yang merupakan salah satu mantan Ketua Umum Partai Golkar. “Menurut Kalla, adanya kelompok-kelompok di Golkar bisa terjadi karena pernah dalam satu kepengurusan. Dia mencontohkan dirinya atau Aburizal Bakrie yang pernah menjadi Ketua Umum Golkar. Begitu juga dengan Akbar Tanjung, dan lainnya” (Kompas.com, 2017). Ihwal adanya grup-grup besar di Golkar ini disebut Presiden Joko Widodo saat membuka musyawarah nasional luar biasa Golkar pada Senin malam, 18 Desember 2017. Dia menyebut sejumlah grup besar seperti grup Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Luhut Binsar Panjaitan, Akbar Tanjung, maupun Agung Laksono.

Walaupun demikian, sebenarnya Partai Golkar menjadi salah satu partai yang mampu membebaskan diri dari ketergantungan pada seseorang sosok atau pemimpin. Seperti sering dikatakan banyak pengamat tak ada pemegang saham mayoritas dalam Partai Golkar. Inilah kekuatan sekaligus kelemahan Partai Golkar seperti sudah terbukti, partai ini menjadi solid saat menghadapi gempuran hebat diawal reformasi. Oleh karena itu, partai Golkar tidak akan kehilangan stok pemimpin yang siap menggantikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Generasi Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono harus rela dan segera menyerahkan estafet kepemimpinan kepada generasi dibawahnya. Namun demikian, konflik kepentingan yang muncul mengalami pergeseran, tidak lagi berbasis kelompok fungsional namun berbasis kelompok pertemanan (*clique*) dalam organisasi. Ada faksi Setya Novanto dengan pendukung utama seperti Azis Syamsudin, Roem Kono. Kemudian, faksi Ade Komarudin dengan pendukung utama Bambang Soesatyo, Firman Soebagyo, M Misbhakun. Ada pula faksi Airlangga Hartarto dengan pendukung utama Fayakhun Andriadi". Persoalan *clique*, juga bisa tergambar pada saat perhelatan penentuan calon presiden antara kubu Aburizal Bakrie dan Luhut Panjaitan.

It should be noted that Golkar suffered a split in the 2014 presidential election wherein the faction of Chairman Aburizal Bakrie supported Prabowo-Hatta Rajasa, while the other faction led by Luhut Panjaitan voted for Joko Widodo-Kalla (Aminudin, 2016).

Lebih jauh, diluar itu semua masih ada pula tokoh-tokoh muda Partai Golkar yang tengah mencoba membangun dukungan seperti Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainudin Amali, Agun Gunandjar Sudarsa dan sebagainya. Selanjutnya, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar secara resmi mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai nahkoda baru partai berlambang pohon beringin.

Kesimpulan

Golkar lahir sebagai respon menguatnya peran politik Partai Komunis Indonesia di penghujung kekuasaan Orde Lama. Setelah kekuasaan beralih dari Soekarno ke Soeharto, yang menandai bergantinya rezim, Golkar terus mengawal dan menjadi penyokong utama rezim Orde Baru disamping ABRI dan Birokrasi di bawah komando Soeharto. Selama Orde Baru berkuasa, pemilu yang diselenggarakan mulai

tahun 1971 sampai 1998, Golkar selalu menjadi partai pemenang mayoritas di atas 60%.

Krisis moneter yang melanda Indonesia berimbas pada krisis politik yang memaksa Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada wakil Presiden B.J. Habibie yang sekaligus menandai berakhirnya rezim Orde Baru. Setelah Orde Baru bubar, kekuatan Golkar mengalami penurunan seiring dengan mengikisnya dukungan masyarakat akibat ditinggalkan oleh kelompok yang mewarnai faksionalisme di internal Golkar. Namun demikian, kekuatan politik Golkar tidak benar-benar habis, hal ini dibuktikan dengan hasil pemilu 1999 yang mampu meraih posisi runner-up dengan suara 22% di bawah suara PDIP 36%. Bertahannya suara Golkar ini tidak lepas dari strategi Akbar Tanjung sebagai Ketua Umum yang berusaha merespon tuntutan reformasi seperti demokratisasi dan transparansi. Dengan adanya keterbukaan ini banyak kader-kader baru yang masuk dan mewarnai dinamika faksionalisme di internal Golkar pasca Orde Baru.

Dinamika faksionalisme di internal Golkar pasca Orde Baru semakin tinggi tensinya akibat adanya persaingan kader untuk berebut kekuasaan di Daerah sebagai wujud otonomi. Pragmatisme politik yang menyeruak ditambah perilaku nepotism dalam persaingan pilkada telah mendorong Golkar kedalam persaingan internal baru berupa clique kelompok yang berporos pada personal. Dengan demikian, dalam internal Golkar sekarang ini faksionalisme yang berbasis pada kelompok fungsionalis telah bergeser ke kelompok berbasis nepotis yang muncul dari kedekatan selama menjalankan kepemimpinan.

Daftar Rujukan

- Anderson, B. and Kahin, Andrey (1982) *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate*. Ithaca : Cornell Modern Indonesian Project.
- Aminuddin, M. F. (2016) 'Electoral System and Party Dimension Assessment in Democratic Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), pp. 1–15.
- Amstutz, Mark R. (1982) *An Introduction to Political Science, The Management of Conflict*, USA: Foreman and Company.
- Bibby, John F. (1992) *Politics, Parties, and election in America*, Chicago: Nelson-Hall Publisher.

- Fionna, Ula, and Dirk Tomsa (2017) *Parties and Factions in Indonesia: The Effects of Historical Legacies and Institutional Engineering, The ISEAS Working Paper Series*, ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Geertz, Clifford, (1960) *The Religion of Java*. Glencoe : The Free Press.
- , Clifford, (1959) “The Javanese Kyai: The Changing Role of a Cultural Broker”, *Comparative Studies in Society and History*, (2): 250–256.
- , Clifford, (1965) *The Social History of an Indonesian Town*. Cambridge, Massachusets: MIT Press.
- , Clifford, (1981) *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya
- Hadi, Dwi Wahyono dan Gayung Kasuma (2012) PROPAGANDA ORDE BARU 1966-1980, *Verleden*, Vol. 1 No. 1
- Hagopian, Mark N. (1978) *Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction To Political Science*, New York, and London, Logman Inc.
- Jackson, Karl D., (1973) *Traditional Authority, Islam and Rebellion*. Berkeley: University of California Press.
- , dan Lucian, W. Pye, (1978) *Political Power and Communication in Indonesia*, London, University of California Press.
- Misrin. (2010) Meta Morposis Faksionalisme Internal Partai Golkar di Maluku Utara Pada Pilkada 2007, *Jurnal Studi Pemerintahan* Volume 1 Nomor 1.
- Mawazi, Abd. Rahman (2017) Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensil di Indonesia, *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 6, No. 2
- Neumann, Sigmund (1956) *Toward a Comparative Study of Political Parties, dalam Modern Political Parties*, ed. S. Neumann, Chicago: University of Chicago Press.
- Ridha, T.R Muhammad (2016) Dilema Pelembagaan Partai Gologan Karya (GOLKAR) Di Tingkat Lokal: Fenomena politik Klan, *CosmoGov*, Vol. 2 No. 1.
- Thohari, Hajriyanto Y. (2002) *Kepemimpinan Nasional, Antara Primodialisme dan Akuntabilitas*, dalam Maruto MD dan Anwari WMK, (editor), *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.